

ABSTRAK

RINA SAFITRI, 2022325, Judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN (STUDI KASUS SAMPAH DALAM LINGKUNGAN)” di bawah bimbingan **Bapak Agus Surya Dharma, S.Sos.,M.AP** sebagai pembimbing I dan **Bapak H. Yusran Fahmi, S.IP.,M.AP** sebagai pembimbing II.

Implementasi Perda Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di Amuntai Selatan namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal, ditandai dengan pencemaran akibat pembuangan dan pembakaran limbah kayu industri mebel. Masalah ini dipicu rendahnya kesadaran pengrajin dan minimnya sosialisasi aturan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi peraturan tersebut serta faktor-faktor yang memengaruhinya demi mewujudkan tata kelola lingkungan yang bersih.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder menggunakan teknik *purposive sampling* dengan 11 informan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data dilakukan melalui triangulasi sumber, metode, dan teori, serta member check untuk memastikan kredibilitas data penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Selatan, khususnya dalam pengelolaan sampah khusus pada usaha meubel kayu, secara umum telah berjalan cukup baik. **Pertama**, pada aspek kebijakan yang diinginkan, kejelasan tujuan dan aturan pelaksanaan pengelolaan sampah khusus belum sepenuhnya dipahami pelaku usaha, meskipun kebijakan dinilai cukup sesuai dengan kondisi lokal. **Kedua**, pada kelompok sasaran, tingkat pemahaman, partisipasi, dan kepatuhan pelaku usaha meubel dalam mengelola limbah serbuk dan potongan kayu masih tergolong rendah. **Ketiga**, dari sisi organisasi pelaksana, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, koordinasi, serta sarana dan prasarana menjadi kendala utama pelaksanaan kebijakan. **Keempat**, faktor lingkungan menunjukkan adanya dukungan masyarakat terhadap usaha meubel sebagai mata pencaharian, namun budaya dan kebiasaan pengelolaan sampah yang tidak sesuai ketentuan masih berlangsung. Faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi kejelasan tujuan, kesesuaian lokal, dan kesadaran sebagian pelaku usaha, sedangkan faktor penghambat mencakup rendahnya kepatuhan, keterbatasan sumber daya, fasilitas, serta budaya pengelolaan sampah yang belum tertib.

Disarankan peningkatan sosialisasi, pengawasan, dan sarana kebersihan oleh pemerintah, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan limbah meubel sesuai PERDA secara berkelanjutan.

ABSTRACT

RINA SAFITRI, 2022325. “IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 7 OF 2016 ON ENVIRONMENTAL CLEANLINESS AND AESTHETICS IN SOUTH AMUNTAI DISTRICT, HULU SUNGAI UTARA REGENCY (CASE STUDY OF WASTE WITHIN THE ENVIRONMENT)”. Supervised by **Agus Surya Dharma, S.Sos., M.AP** (Supervisor I) and **H. Yusran Fahmi, S.IP., M.AP** (Supervisor II).

The implementation of Regional Regulation of Hulu Sungai Utara Regency Number 7 of 2016 concerning the administration of environmental cleanliness and aesthetics in South Amuntai has not yet been optimal. This is evidenced by environmental pollution resulting from the disposal and burning of wood waste generated by furniture industries. The issue is primarily driven by the low level of awareness among craftsmen and the limited dissemination of regulatory information. This study aims to analyze the implementation of the regulation and the factors influencing it in order to achieve effective and sustainable environmental governance.

This research employs a qualitative approach with a descriptive research design. Data sources consist of both primary and secondary data, obtained through purposive sampling involving 11 informants. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis is conducted using the interactive model of Miles and Huberman, which comprises data reduction, data display, and conclusion drawing. Data credibility is ensured through triangulation of sources, methods, and theories, as well as member checking to validate the research findings.

The results indicate that the implementation of Regional Regulation of Hulu Sungai Utara Regency Number 7 of 2016 concerning environmental cleanliness and aesthetics in South Amuntai District, particularly in the management of specific waste from wood furniture businesses, has generally been moderately effective. First, in terms of policy objectives, the clarity of goals and operational guidelines for special waste management has not been fully understood by business actors, although the policy is considered relatively appropriate to local conditions. Second, regarding the target group, the levels of understanding, participation, and compliance among furniture business actors in managing sawdust and wood waste remain low. Third, from the perspective of implementing organizations, limitations in human resource capacity, coordination, and infrastructure constitute major challenges in policy implementation. Fourth, environmental factors reveal community support for furniture businesses as a source of livelihood; however, cultural practices and habits of improper waste management persist. Supporting factors include clarity of objectives, local relevance, and partial awareness among business actors, while inhibiting factors encompass low compliance, limited resources and facilities, and inadequate waste management practices.

It is recommended that the government enhance socialization efforts, supervision, and the provision of sanitation facilities, alongside strengthening the compliance of business actors and the community in managing furniture waste in accordance with the regulation in a sustainable manner.